



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
Jl. Pramuka No. 33, BPKP Pusat Lantai 4, Jakarta 13120, Telp/Fax: 021-85910107

LAPORAN KINERJA BPKP TRIWULAN I TAHUN 2018

NOMOR : LKIN - 21/SU01/2/2018
TANGGAL : 17 Mei 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN**

Gedung BPKP Pusat Lantai 4, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Ext. 0415/, Faksimile 021-85910107

Nomor : LKIN-21/SU01/2/ 2018 17 Mei 2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan I
Tahun 2018

**Yth. Sekretaris Utama
di**

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan I Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja BPKP sampai dengan triwulan I tahun 2018 diperlihatkan sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja BPKP Triwulan I Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi s.d. Tw I 2018	Capaian s.d. Tw I 2018
I	<i>Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional</i>			
1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 2	Belum diukur	Belum diukur
II	<i>Sasaran Strategis 2. Meningkatnya maturitas SPIP</i>			
2	Maturitas SPIP K/L (Level 3)	55%	25,29%	45,98%
3	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	60%	47,06%	78,43%
4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	45%	29,92%	66,49%
5	Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)	50%	Belum diukur	Belum diukur
III	<i>Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda</i>			
6	Kapabilitas APIP K/L (Level 3)	56%	26,74%	47,75%
7	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	74%	50,00%	67,57%
8	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	51%	24,02%	47,10%

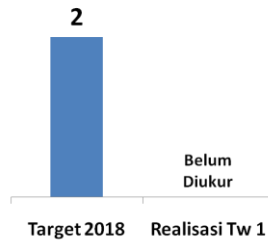
Kinerja BPKP sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian 1 indikator kinerja yaitu Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N), dengan uraian kinerja sebagai berikut:

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)



Indeks AP3N diperoleh dari rata-rata hasil pengukuran indeks AP3N berbagai prioritas pembangunan nasional. Indeks ini diukur menggunakan 5 variabel, 5 dimensi, dan 89 indikator.

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018, pemerintah menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 32 program prioritas dan 160 kegiatan prioritas, sebagai berikut:

Tabel 2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas		Jumlah Keg. Prioritas
1	Pendidikan	1	Pendidikan Vokasi	5
		2	Peningkatan Kualitas Guru	4
2	Kesehatan	3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	3
		4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,	3
		5	Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat".	3
3	Perumahan dan Permukiman	6	Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak	4
		7	Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi	2
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	8	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	4
		9	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	5
		10	Pengembangan 3 Kawasan Industri	4
		11	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	9
		12	Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa	4
5	Ketahanan Energi	13	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	7
		14	Pemenuhan Kebutuhan Energi	6
6	Ketahanan Pangan	15	Peningkatan Produksi Pangan	7
		16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8
7	Penanggulangan Kemiskinan	17	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	5
		18	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3

		19	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	5
8	Infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman	20	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara, dan Intermoda)	3
		21	Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika	5
9	Pembangunan Wilayah	22	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	6
		23	Pembangunan Perdesaan	7
		24	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	5
		25	Reforma Agraria	5
		26	Percepatan Pembangunan Wilayah Papua	7
10	Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan	27	Penguatan Pertahanan	4
		28	Stabilitas Politik dan Keamanan	12
		29	Kepastian Hukum	3
		30	Reformasi Birokrasi	4
11	Asian Games dan Asian Para Games 2018	31	Sukses Penyelenggaraan	5
		32	Sukses Prestasi	3
	JUMLAH			160

Atas 11 prioritas pembangunan nasional dan 32 program prioritas tersebut, BPKP akan melakukan pengukuran indeks P3N antara lain pada 4 program prioritas, yaitu :

- 1) Program perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja pada Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
- 2) Program peningkatan produksi pangan pada Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
- 3) Program pembangunan sarana dan prasarana pertanian pada Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
- 4) Program pengembangan sarana dan prasarana transportasi pada Prioritas Nasional Infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman (darat, laut, udara, intermoda).

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan indeks AP3N berada pada level 2.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, indeks AP3N belum dilakukan pengukuran. Indeks AP3N ditargetkan dan akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV setelah dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program prioritas, kegiatan prioritas, serta proyek prioritas yang berada di bawah masing-masing prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indeks AP3N skala 2 pada tahun 2018, upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP pada triwulan I tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Pada triwulan I tahun 2018, BPKP telah melakukan monev dan reviu tata kelola proyek-proyek strategis nasional bidang perekonomian dan kemaritiman, sebagai berikut:

Tabel 3. Reviu Tata Kelola PSN Trw. I Tahun 2018 Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

No	Monev/ Reviu Infrastruktur PSN	Jml PSN yang di reviu
1	Pembangunan jalan tol	48
2	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	30
3	Pembangunan/ pengembangan bendungan	24
4	Pembangunan/ pengembangan jalur kereta api	14
5	Pembangunan/ pengembangan kawasan Industri	14
6	Pembangunan/ pengembangan pelabuhan	11
7	Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK)	8
8	Pembangunan/ pengembangan bandara	6
9	Pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional	6
10	Pembangunan smelter	5
11	Pembangunan waduk	5
12	Pembangunan irigasi	2
13	Pembangunan LRT	2
14	Pembangunan jalan non tol	1
15	Pengembangan pesawat N-245 dan R80	1
	JUMLAH	177

2) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Nasional Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Di bidang polhukam dan PMK, pada triwulan I tahun 2018, BPKP telah melakukan monev dan reviu tata kelola proyek-proyek strategis, sebagai berikut:

Tabel 4. Reviu Tata Kelola PSN Trw. I Tahun 2018 Bidang Polhukam dan PMK

No	Monev/ Reviu Infrastruktur PSN	Jml PSN yang di reviu
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8
2	Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal (<i>Jakarta Sewerage System</i>)	1
	JUMLAH	9

3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pada triwulan I tahun 2018, BPKP melakukan pembinaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah (BMD), pendapatan, dan perencanaan dengan mengimplementasikan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan, sebagai berikut:

Tabel 5. Bimtek/ Coaching Clinic SIMDA Tw I 2018

No	SIMDA	Jml Pemda
1	Perencanaan	50
2	Keuangan	23
3	BMD	8
4	Pendapatan	8
	Jumlah	89

Di samping itu, pada triwulan I tahun 2018, BPKP melakukan evaluasi penyaluran/ penggunaan dana desa pada 115 kabupaten/ kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

4) Kegiatan Pengamanan Aset Negara/ Keinvestigasian

Dalam triwulan I tahun 2018, BPKP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan aset negara/ keinvestigasian, yaitu audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli (PKA), evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, audit klaim, dan *fraud control plan*, dengan realisasi output sebanyak 403 laporan, mencapai 34,74% dari target tahun 2018 sebanyak 1.160 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Output Kegiatan Keinvestigasian

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018	Realisasi Tw I 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100
1	<i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i> pada bidang Lintas Sektoral Pendidikan Vokasi	Laporan	69	-	-
2	Penilaian Risiko Kecurangan Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	Laporan	69	-	-
3	Kajian pengawasan atas Akses Pembiayaan UMKM	Laporan	6	-	-
4	Mitigasi risiko atas pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada BNPB	Laporan	11	-	-

5	Audit Investigatif atas Pelaksanaan PSN	Laporan	52	-	-
6	Audit Investigatif	Laporan	66	30	45,45
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	Laporan	153	96	62,75
8	Pemberian Keterangan Ahli	Laporan	390	227	58,21
9	Komputer Forensik	Laporan	5	-	-
10	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	Laporan	29	8	27,59
11	Audit Penyesuaian Harga	Laporan	24	5	20,83
12	Audit Klaim	Laporan	17	2	11,76
13	Evaluasi atas Pelaksanaan Inpres 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	35	-	-
14	Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)	Laporan	71	-	-
15	<i>Fraud Control Plan</i>	Laporan	68	3	4,41
16	Kajian pengawasan	Laporan	1	-	-
17	Pengawasan atas pengamanan aset	Laporan	6	-	-
18	Peningkatan kompetensi auditor investigasi	Laporan	4	-	-
19	Kegiatan pengawasan lainnya	Laporan	84	32	38,10
Jumlah			1.160	403	34,74

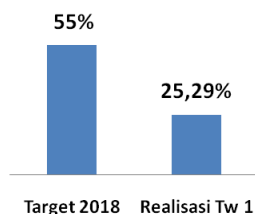
2 Sasaran Strategis Meningkatnya Maturitas SPIP

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Maturitas SPIP ditunjukkan oleh pencapaian 4 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Maturitas SPIP K/L (level 3)
- 2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
- 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)
- 4) Efektivitas SPI Korporasi

Uraian kinerja 4 indikator tersebut sebagai berikut:

Maturitas SPIP K/L (Level 3)



Maturitas SPIP K/L (level 3) dihitung dari jumlah K/L dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah K/L yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP K/L (level 3) sebesar 55%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, maturitas SPIP K/L minimal level 3 sebanyak 22 K/L, atau 25,29% dari jumlah K/L sebanyak 87. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 45,98%.

Dalam triwulan I tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 1 K/L yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 7. Perkembangan Jml K/L yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3 menurut Kedepuitan Pembina

No	Kedepuitan Pembina	Jml K/L Mitra	Jumlah K/L SPIP Min. Lv 3			K/L Minimal Level 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
1	Perekonomian	27	8	8	-	1) Kem. Keuangan, 2) Kem. Kelautan dan Perikanan, 3) BKPM, 4) Kem. ESDM, 5) Kem. Pariwisata, 6) Kem. Perdagangan, 7) BNP2TKI, 8) BPS
2	Polhukam	55	12	12	-	1) KPK, 2) BPKP, 3) Lemhanas, 4) Kemenlu, 5) Kem. Sekretaris Negara, 6) Kemendikbud, 7) Kemenristekdikti, 8) BPPT, 9) BAPETEN, 10) BATAN, 11) BPOM, 12) ANRI
3	PKD	2	-	1	1	1) Kemendagri
4	AN	3	1	1	-	1) Kemen. BUMN
	Jumlah	87	21	22	1	

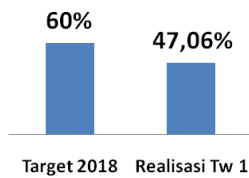
Tabel 8. Kondisi Maturitas SPIP K/L Tw I 2018

No	Kedepuitan Pembina	Jml K/L Mitra	Belum Dinilai	≤ Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Perekonomian	27	-	5	14	8
2	Polhukam	55	5	5	33	12
3	PKD	2	-		1	1
4	AN	3	-	1	1	1
	Jumlah	87	5	11	49	22
	Persentase	100%	4,75%	12,64%	56,32%	25,29%

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) dihitung dari jumlah Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah Pemerintah Provinsi yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 60%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, Jumlah Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP minimal level 3 sebanyak 16 Pemprov, atau 47,06% dari jumlah Pemprov sebanyak 34.



Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 78,43%.

Dalam triwulan I tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 1 Pemprov yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

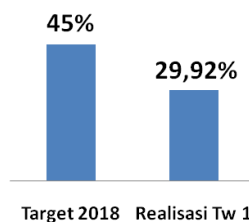
Tabel 9. Perkembangan Jml Pemprov yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3

No	Populasi Pemprov	Jumlah Pemprov SPIP Min. Lv 3			Pemprov Minimal level 3
		2017	Tw I 2018	Perubahan	
1	34	15	16	1	1) Sumatera Barat, 2) Kepulauan Riau, 3) Jawa Tengah, 4) Jawa Timur, 5) Daerah Istimewa Yogyakarta, 6) Bali, 7) Nusa Tenggara Barat, 8) Gorontalo, 9) Jambi, 10) Lampung, 11) Kalimantan Barat, 12) Kalimantan Selatan, 13) Sulawesi Selatan, 14) Sulawesi Tengah, 15) Maluku Utara, 16) Sulawesi Tenggara

Tabel 10. Kondisi Maturitas SPIP Pemprov Tw I 2018

No	Jml Pemprov	Belum Dinilai	≤ Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	34	-	7	11	16
	Persentase	-	20,59%	32,35%	47,06%

Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (Level 3)



Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) dihitung dari jumlah Pemerintah Kab/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah Pemerintah Kab/Kota yang ada.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) sebesar 45%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, Jumlah Pemerintah Kab/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 sebanyak 152 Pemkab/Pemkot, atau 29,92% dari jumlah Pemkab/Pemkot sebanyak 508. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 66,49%.

Dalam triwulan I tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 37 Pemkab/Pemkot yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu: 1) Kab. Aceh Barat, 2) Kab. Aceh Utara, 3) Kota Langsa, 4) Kota Binjai, 5) Kab. Humbang Hasundutan, 6) Kab. Labuhan Batu Utara, 7) Kab. Agam, 8) Kota Solok, 9) Kab. Indragiri Hilir, 10) Kab. Kampar, 11) Kab. Bangka, 12) Kab. Bangka Tengah, 13) Kab. Bangka Barat, 14) Kab. Lampung Selatan, 15) Kab. Tanggamus, 16) Kab. Lebak, 17) Kab. Tangerang, 18) Kab. Bogor, 19) Kab. Kuningan, 20) Kab. Sukabumi, 21) Kota Bekasi, 22) Kota Depok, 23) Kota Banjar, 24) Kab. Banyumas, 25) Kab. Pekalongan, 26) Kab. Sragen, 27) Kota Magelang, 28) Kab. Purworejo, 29) Kab. Cilacap, 30) Kab. Balangan, 31) Kab. Katingan, 32) Kab. Polewali Mandar, 33) Kab. Konawe, 34) Kab. Kolaka, 35) Kota Kendari, 36) Kab. Wakatobi, dan 37) Kab. Kolaka Utara.

Berdasarkan hasil *quality assurance*/ validasi/ rekonsiliasi oleh Kedepatian Rendal, sebanyak 3 Pemkab/ Pemkot perlu peningkatan dalam hal penilaian risiko, yaitu: 1) Kab. Blitar, 2) Kota Malang, dan 3) Kab. Tanah Bumbu (Kalsel).

Gambar 1. Sebaran Kab/Kota Maturitas SPIP Level 3



Tabel 11. Perkembangan Jml Pemkab/Pemkot yang Mencapai Maturitas SPIP Minimal Level 3

No	Provinsi	Populasi Kab/Kot	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
Sumatera						
1	Aceh	23	2	5	3	1) Kab. Aceh Besar, 2) Kota Banda Aceh, 3) Kab Aceh Barat, 4) Kab. Aceh Utara, 5) Kota Langsa
2	Sumut	33	-	3	3	1) Kota Binjai, 2) Kab. HUmbang Hasundutan, 3) Kab. Labuhan Batu Utara
3	Sumbar	19	8	10	2	1) Kab Tanah Datar, 2) Kota Padang, 3) Kota Payakumbuh, 4) Kota Bukit Tinggi, 5) Kab Pesisir Selatan, 6) Kab Dharmasraya, 7) Kab Padang Pariaman, 8) Kota Pariaman, 9) Kab. Agam, 10) Kota Solok
4	Riau	12	2	4	2	1) Kab. Kep. Meranti, 2) Kab. Pelalawan, 3) Kab. Indragiri Hilir, 4) Kab. Kampar
5	Kepri	7	2	2	-	1) Kota Tanjung Pinang, 2) Kab Karimun
6	Jambi	11	2	2	-	1) Kab. Kerinci, 2) Kota Sungai Penuh
7	Sumsel	17	5	5	-	1) Kab Lahat, 2) Kab Muara Enim, 3) Kab. Ogan Komerling Ilir, 4) Kab. Banyuasin, 5) Kab. Musi Banyuasin
8	Bengkulu	10	-	-	-	-
9	Babel	7	-	3	3	1) Kab. Bangka, 2) Kab. Bangka Tengah, 3) Kab. Bangka Barat

No	Provinsi	Populasi Kab/Kot	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
10	Lampung	15	5	7	2	1) Kab Pringsewu, 2) Kota Bandar Lampung, 3) Kota Metro, 4) Kab. Way Kanan, 5) Kab. Pesawaran, 6) Kab. Lampung Selatan, 7) Kab. Tanggamus
	Jumlah	154	26	41	15	
Jawa						
1	Banten	8	3	5	2	1) Kab Serang, 2) Kota Tangerang, 3) Kota Tangerang Selatan, 4) Kab. Lebak, 5) Kab. Tangerang
2	DKI Jakarta					
3	Jabar	27	-	6	6	1) Kab. Bogor, 2) Kab. Kuningan, 3) Kab. Sukabumi, 4) Kota Bekasi, 5) Kota Depok, 6) Kota Banjar
4	Jateng	35	11	17	6	1) Kab Kudus, 2) Kota Surakarta, 3) Kab Boyolali, 4) Kab Karanganyar, 5) Kab. Magelang, 6) Kota Semarang, 7) Kab. Temanggung, 8) Kab. Pati, 9) Kab. Blora, 10) Kota Salatiga, 11) Kota Pekalongan, 12) Kab. Banyumas, 13) Kab. Pekalongan, 14) Kab. Sragen, 15) Kota Magelang, 16) Kab. Purworejo, 17) Kab. Cilacap
5	DIY	5	5	5	-	1) Kab Sleman, 2) Kab Kulonprogo, 3) Kota Yogyakarta, 4) Kab. Gunung Kidul, 5) Kab. Bantul
6	Jatim	38	15	13	2	1) Kab Bojonegoro, 2) Kab Ponorogo, 3) Kab Pacitan, 4) Kota Blitar, 5) Kota Mojokerto, 6) Kab Pasuruan, 7) Kota Surabaya, 8) Kab Tulungagung, 9) Kab Jombang, 10) Kab Lumajang, 11) Kab Bondowoso, 12) Kab Probolinggo, 13) Kab Banyuwangi
	Jumlah	113	34	46	14	
Kalimantan						
1	Kalbar	14	4	4	-	1) Kota Pontianak, 2) Kab. Kubu Raya, 3) Kab. Sintang, 4) Kab. Landak

No	Provinsi	Populasi Kab/Kot	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
2	Kalteng	14	4	5	1	1) Kab. Kotawaringin Timur, 2) Kota Palangkaraya, 3) Kab. Kotawaringin Barat, 4) Kab. Lamandau, 5) Kab. Katingan
3	Kalsel	13	6	6	-	1) Kab Banjar, 2) Kota Banjarmasin, 3) Kab. Tabalong, 4) Kab. Hulu Sungai Utara, 5) Kota Banjarbaru, 6) Kab. Balangan
4	Kaltim	10	4	4	-	1) Kota Balikpapan, 2) Kota Bontang, 3) Kota Samarinda, 4) Kab. Kutai Kartanegara
5	Kaltara	5	-	-	-	-
	Jumlah	56	18	19	1	
Sulawesi						
1	Sulut	15	4	4	-	1) Kota Bitung, 2) Kota Manado, 3) Kota Kotamobagu, 4) Kab. Kepulauan Talaud
2	Gorontalo	6	3	3	-	1) Kota Gorontalo, 2) Kab. Gorontalo, 3) Kab. Pohuwato
3	Sulbar	6	1	2	1	1) Kab. Majene, 2) Kab. Polewali Mandar
4	Sulteng	13	1	1	-	1) Kab. Morowali
5	Sulsel	24	7	7	-	1) Kab Pinrang, 2) Kab. Luwu Utara, 3) Kota Makassar, 4) Kab. Wajo, 5) Kota Pare pare, 6) Kab. Sidenreng Rappang, 7) Kota Palopo
6	Sultra	17	-	5	5	1) Kab. Konawe, 2) Kab. Kolaka, 3) Kota Kendari, 4) Kab. Wakatobi, 5) Kab. Kolaka Utara
	Jumlah	81	16	22	6	
Bali + Nusa Tenggara						
1	Bali	9	6	6	-	1) Kab Gianyar, 2) Kab Jembrana, 3) Kota Denpasar, 4) Kab Badung, 5) Kab. Buleleng, 6) Kab. Tabanan
2	NTB	10	5	5	-	1) Kab Lombok Barat, 2) Kab Lombok Tengah, 3) Kota Mataram, 4) Kab. Sumbawa Barat, 5) Kab. Sumbawa
3	NTT	22	5	5	-	1) Kab Timur Tengah Selatan, 2) Kab. Timor Tengah Utara, 3) Kab. Sikka, 4) Kab. Sumba Timur, 5)

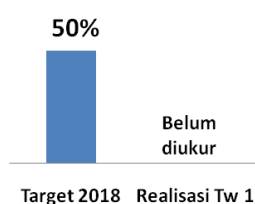
No	Provinsi	Populasi Kab/Kot	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
						Kab. Manggarai Barat
	Jumlah	41	16	16	-	
	Maluku + Malut					
1	Maluku	11	3	3	-	1) Kab. Buru, 2) Kab. Maluku Tenggara, 3) Kab. Maluku Tengah
2	Maluku Utara	10	2	2	-	1) Kota Ternate, 2) Kota Tidore Kepulauan
	Jumlah	21	5	5	-	
	Papua + Pabar					
1	Papua	29	-	-	-	-
2	Papua Barat	13	3	3	-	1) Kab. Sorong, 2) Kab. Teluk Bintuni, 3) Kab. Sorong Selatan
	Jumlah	42	3	3	-	
	Total	508	118	152	34	

Tabel 12. Kondisi Maturitas SPIP Pemkab/Pemkot Tw I 2018

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 0	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Aceh	23	-	-	18	5
2	Sumut	33	4	26	-	3
3	Sumbar	19	-	2	7	10
4	Riau	12	-	7	1	4
5	Kepri	7	-	1	4	2
6	Jambi	11	-	3	6	2
7	Sumsel	17	-	7	5	5
8	Bengkulu	10	-	7	3	-
9	Babel	7	-	1	3	3
10	Lampung	15	-	6	2	7
11	Banten	8	-	-	3	5
12	DKI Jakarta					
13	Jabar	27	-	19	2	6
14	Jateng	35	-	12	6	17
15	DIY	5	-	-	-	5
16	Jatim	38	-	-	25	13
17	Kalbar	14	-	-	10	4
18	Kalteng	14	-	-	9	5
19	Kalsel	13	-	-	7	6
20	Kaltim	10	1	4	1	4
21	Kaltara	5	-	4	1	-
22	Sulut	15	-	4	7	4
23	Gorontalo	6	-	-	3	3

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 0	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
24	Sulbar	6	-	1	3	2
25	Sulteng	13	1	9	2	1
26	Suisel	24	-	3	13	7
27	Sultra	17	1	10	1	5
28	Bali	9	-	-	3	6
29	NTB	10	-	-	5	5
30	NTT	22	-	3	14	5
31	Maluku	11	5	3	0	3
32	Maluku Utara	10	-	5	3	2
33	Papua	29	7	18	4	-
34	Papua Barat	13	-	10	3	-
Jumlah		508	19	155	182	152
Persentase		100%	3,74%	30,51%	35,83%	29,92%

Efektivitas SPI Korporasi



Efektivitas SPI korporasi dihitung dari jumlah korporasi dengan efektivitas SPI minimal level 3, dibagi jumlah korporasi yang dievaluasi.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan efektivitas SPI korporasi sebesar 50%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, efektivitas SPI korporasi belum ditargetkan, dan belum dilakukan pengukuran. Pengukuran efektivitas SPI korporasi akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2018 setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi sistem pengendalian intern korporasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP pada triwulan I tahun 2018 dalam upaya meningkatkan maturitas SPIP K/L/Pemda berupa bimtek/ *coaching clinic/ Quality Assurance* penilaian maturitas SPIP dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 13. Pembinaan Maturitas SPIP K/L/Pemda Tw I 2018

No	Bimtek/ <i>Coaching Clinic/ QA</i> Penilaian Maturitas SPIP	Jml K/L/Pemda
1	Kementerian/ Lembaga	6
2	Pemerintah Provinsi	23
3	Pemerintah Kabupaten	189
4	Pemerintah Kota	40
	JUMLAH	258

Di samping itu, untuk mewujudkan komitmen yang kuat dari pimpinan K/L, BPKP mengadakan acara bincang pagi SPIP yang bertemakan “Strategi Akselerasi Peningkatan Maturitas SPIP dalam Rangka Menyukkseskan Target RPJMN” yang dihadiri Sesmenko/Sesmen/Sekjen/Sestama 28 K/L mitra kerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia.

Di lingkungan korporasi, pada triwulan I 2018, BPKP telah melakukan bimbingan teknis/ evaluasi penilaian sistem pengendalian intern (SPI) pada 5 BUMD, sebagai berikut:

Tabel 14. Pembinaan Efektivitas SPI Korporasi Tw I 2018

No	Bimtek/ Evaluasi SPI
1	PDAM Tirta Sejiran Setason Kab Bangka Barat
2	PDAM Kota Palangka Raya
3	PDAM Kabupaten Lamandau
4	PDAM Kabupaten Gorontalo
5	PDAM Kabupaten Kubu Raya

Di samping pembinaan efektivitas SPIIP korporasi, pada triwulan I 2018, BPKP telah melakukan evaluasi kinerja PDAM pada 227 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, dan melakukan bimbingan teknis/ assessment penerapan GCG pada 40 korporasi, baik BUMD maupun BUMN.

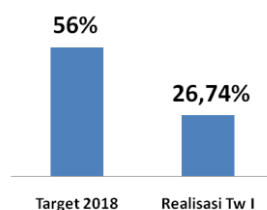
3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas APIP

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas APIP ditunjukkan oleh pencapaian 3 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Kapabilitas APIP K/L (level 3)
- 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
- 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)

Uraian kinerja 3 indikator tersebut sebagai berikut:

Kapabilitas APIP K/L (Level 3)



Kapabilitas APIP K/L (level 3) dihitung dari jumlah APIP K/L dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP K/L yang ada.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP K/L dengan kapabilitas (level 3) sebesar 56%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah APIP K/L dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 23 APIP, atau 26,74% dari jumlah APIP K/L sebanyak 86. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 47,75%.

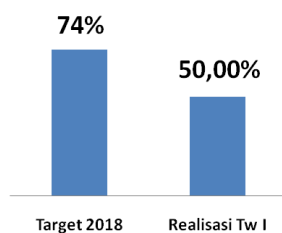
Tabel 15. Perkembangan Jml APIP K/L yang Mencapai Kapabilitas Level 3

No	Kedeputian Pembina	Jml APIP Mitra	Jumlah APIP K/L Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP K/L Minimal Level 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
1	Perekonomian	27	8	8	-	1) Kem. Keuangan, 2) Bappenas, 3) Kem. Kelautan dan Perikanan, 4) Kem. Lingkungan Hidup, 5) Kem. ESDM, 6) Kem. Pertanian, 7) Kem. Perhubungan, 8) BNP2TKI
2	Polhukam	55	11	14	3	1) BPKP, 2) Kemenkumham, 3) Kemendikbud, 4) Kemenristekdikti, 5) BPPT, 6) Badan tenaga nuklir nasional, 7) Bapeten, 8) BPOM, 9) TNI-AD, 10) Kemenag, 11) KPK, 12) Kemenlu, 13) Kemensesneg, 14) BPK
3	PKD	1	-	-	-	
4	AN	3	1	1	-	1) Kemen. BUMN
	Jumlah	86	20	23	3	

Tabel 16. Kondisi Kapabilitas APIP K/L Tw I 2018

No	Kedeputian Pembina	Jml K/L Mitra	Belum Dinilai	< Lv 1	Lv 2	> Lv 3
1	Perekonomian	27	-	6	13	8
2	Polhukam	55	2	14	25	14
3	PKD	1	-	-	1	-
4	AN	3		1	1	1
	Jumlah	86	2	21	40	23
	Persentase	100%	2,33%	24,42%	46,51%	26,74%

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)



Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) dihitung dari jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas level 3 sebesar 74%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 17 APIP, atau 50,00% dari jumlah APIP Pemprov sebanyak 34. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 67,57%.

Berdasarkan hasil *quality assurance*/ validasi/ rekonsiliasi oleh Kedeputan Rendal, sebanyak 1 APIP Pemprov yaitu APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa kriteria *key process area* masih berada pada kategori infrastruktur sehingga belum dapat dikategorikan dalam level 3.

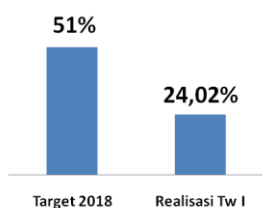
Tabel 17. Perkembangan Jml APIP Pemprov yang Mencapai Kapabilitas Level 3

No	Populasi APIP Pemprov	Jumlah APIP Pemprov Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Pemprov Minimal level 3
		2017	Tw I 2018	Perubahan	
1	34	18	17	(1)	1) Sumatera Barat, 2) Kepulauan Riau, 3) DKI Jakarta, 4) Jawa Barat, 5) Jawa Tengah, 6) Kalimantan Tengah, 7) Kalimantan Selatan, 8) Kalimantan Utara, 9) Gorontalo, 10) Sulawesi Barat, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Maluku Utara, 13) Lampung, 14) DI Yogyakarta, 15) Kalimantan Barat, 16) Kalimantan Timur, 17) Nusa Tenggara Timur

Tabel 18. Kondisi Kapabilitas APIP Pemprov Tw I 2018

No	Jml Pemprov	Belum Dinilai	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	34	-	1	16	17
	Persentase	-	2,94%	47,06%	50,00%

Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (Level 3)



Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) dihitung dari jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas level 3 sebesar 51%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 122 APIP, atau 24,02% dari jumlah APIP Pemkab/Pemkot sebanyak 508. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 47,10%.

Dalam triwulan I tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 4 APIP Pemkab/Pemkot yang mencapai kapabilitas minimal level 3, yaitu: 1) Kab. Indramayu, 2) Kota Bogor, 3) Kab. Purworejo, dan Kab. Sleman.

Berdasarkan hasil *quality assurance*/ reviu oleh Kedeputan Rendal, sebanyak 36 APIP Pemkab/ Pemkot perlu lebih intensif

dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM APIP melalui *joint audit*, bimtek, *workshop*, pemagangan, pendidikan sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern, terutama atas substansi antara lain audit ketaatan, audit kinerja di bidang pelayanan publik, layanan konsultasi kepada OPD terkait perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, yaitu: 1) Kab. Gayo Lues, 2) Kota Binjai, 3) Kab. Tebing Tinggi, 4) Kota Jambi, 5) Kab. Tebo, 6) Kab. Lahat, 7) Kab. Muara Enim, 8) Kab. Tanggamus, 9) Kota Bandar Lampung, 10) Kab. Pringsewu, 11) Kab. Way Kanan, 12) Kota Metro, 13) Kab. Mesuji, 14) Kab. Pandeglang, 15) Kab. Kuningan, 16) Kab. Jepara, 17) Kab. Banyumas, 18) Kab. Blora, 19) Kab. Banjar, 20) Kota Banjarmasin, 21) Kab. Tanah Bumbu, 22) Kab. Tanah Laut, 23) Kab. Barito Kuala, 24) Kab. Hulu Sungai Utara, 25) Kota Balikpapan, 26) Kab. Bontang, 27) Kab. Talaud, 28) Kab. Polewali Mandar, 29) Kota Makassar, 30) Kab. Bulukumba, 31) Kab. Lombok Barat, 32) Kab. Lombok Tengah, 33) Kab. Ngada, 34) Kab. Manggarai Barat, 35) Kab. Paniai, 36) Kab. Fakfak.

Gambar 2. Sebaran Kab/Kota dengan APIP Kapabilitas Level 3



Tabel 19. Perkembangan Jml APIP Pemkab/Pemkot yang Mencapai Kapabilitas Level 3

No	Provinsi	Populasi APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
Sumatera						
1	Aceh	23	4	4	-	1) Kota Banda Aceh, 2) Kota Langsa, 3) Kab. Aceh Barat, 4) Kab. Gayo Lues
2	Sumut	33	2	2	-	1) Kota Binjai, 2) Kab. Tebing Tinggi
3	Sumbar	19	9	9	-	1) Kota Pariaman, 2) Kab. Agam, 3) Kab. Solok, 4) Kab. Tanah Datar, 5) Kab. Padang Pariaman, 6) Kota Padang, 7) Kab. Dharmasraya, 8) Kota Sawahlunto, 9) Kota Bukit Tinggi
4	Riau	12	3	3	-	1) Kab. Rokan Hulu, 2) Kab. Siak, 3) Kab. Indragiri Hilir

No	Provinsi	Populasi APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
5	Kepri	7	2	2	-	1) Kota Tanjung Pinang, 2) Kab. Karimun
6	Jambi	11	2	2	-	1) Kota Jambi, 2) Kab. Tebo
7	Sumsel	17	6	6	-	1) Kab. Banyuasin, 2) Kab. Musi Rawas, 3) Kota Palembang, 4) Kab. Ogan Komering Ilir, 5) Kab. Lahat, 6) Kab. Muara Enim
8	Bengkulu	10	1	1	-	1) Kota Bengkulu
9	Babel	7	2	2	-	1) Kab. Bangka, 2) Kab. Bangka Tengah
10	Lampung	15	6	6	-	1) Kab. Tanggamus, 2) Kota Bandar Lampung, 3) Kab. Pringsewu, 4) Kab. Way Kanan, 5) Kota Metro, 6) Kab Mesuji,
	Jumlah	154	37	37	-	
Jawa						
1	Banten	8	4	4	-	1) Kab. Serang, 2) Kota Cilegon, 3) Kota Tangerang, 4) Kab. Pandeglang
2	DKI Jakarta					
3	Jabar	27	7	9	2	1) Kab. Garut, 2) Kab. Sumedang, 3) Kota Tasikmalaya, 4) Kota Depok, 5) Kab Bogor, 6) Kota Bekasi, 7) Kab. Kuningan, 8) Kab. Indramayu, 9) Kota Bogor
4	Jateng	35	14	15	1	1) Kab. Wonogiri, 2) Kab. Pekalongan, 3) Kab. Pati, 4) Kab. Kudus, 5) Kota Surakarta, 6) Kab. Karanganyar, 7) Kab. Boyolali, 8) Kab. Cilacap, 9) Kab. Grobogan, 10) Kab. Temanggung, 11) Kota Magelang, 12) Kab. Jepara, 13) Kab. Banyumas, 14) Kab. Blora , 15) Kab. Purworejo
5	DIY	5	2	3	1	1) Kab. Bantul, 2) Kab Gunung Kidul, 3) Kab. Sleman
6	Jatim	38	2	2	-	1) Kab. Banyuwangi, 2) Kab. Bondowoso
	Jumlah	113	29	33	4	
Kalimantan						
1	Kalbar	14	5	5	-	1) Kab. Kubu Raya, 2) Kab. Sintang, 3) Kota Pontianak, 4) Kota Singkawang, 5) Kab.

No	Provinsi	Populasi APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
						Landak
2	Kalteng	14	1	1	-	1) Kab. Kotawaringin Timur
3	Kalsel	13	6	6	-	1) Kab. Banjar, 2) Kota Banjarmasin, 3) Kab. Tanah Bumbu, 4) Kab. Tanah Laut, 5) Kab. Barito Kuala, 6) Kab. Hulu Sungai Utara
4	Kaltim	10	4	4	-	1) Kota Samarinda, 2) Kab. Penajam Paser Utara, 3) Kota Balikpapan, 4) Kab. Bontang
5	Kaltara	5	-	-	-	-
	Jumlah	56	16	16	-	
	Sulawesi					
1	Sulut	15	2	2	-	1) Kota Tomohon, 2) Kab. Talaud
2	Gorontalo	6	4	4	-	1) Kab. Gorontalo, 2) Kab. Pohuwato, 3) Kab. Boalemo, 4) Kota Gorontalo
3	Sulbar	6	2	2	-	1) Kab. Majene, 2) Kab. Polewali Mandar
4	Sulteng	13	-	-	-	-
5	Sulsel	24	4	4	-	1) Kab. Pinrang, 2) Kab. Bantaeng, 3) Kota Makassar, 4) Kab. Bulukumba
6	Sultra	17	-	-	-	-
	Jumlah	81	12	12	-	
	Bali + Nusa Tenggara					
1	Bali	9	4	4	-	1) Kab. Gianyar, 2) Kab. Badung, 3) Kab. Jembrana, 4) Kab. Tabanan
2	NTB	10	4	4	-	1) Kota Mataram, 2) Kab. Sumbawa Barat, 3) Kab. Lombok Barat, 4) Kab. Lombok Tengah
3	NTT	22	7	7	-	1) Kab. Manggarai Timur, 2) Kab. Nagekeo, 3) Kab. Sikka, 4) Kab. Sumba Timur, 5) Kab. Flores Timur, 6) Kab. Ngada, 7) Kab. Manggarai Barat
	Jumlah	41	15	15	-	
	Maluku + Malut					

No	Provinsi	Populasi APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			2017	Tw I 2018	Perubahan	
1	Maluku	11	3	3	-	1) Kab. Maluku Tenggara, 2) Kab. Maluku Tengah, 3) Kota Ambon
2	Maluku Utara	10	2	2	-	1) Kota Tidore Kepulauan, 2) Kota Ternate
	Jumlah	21	5	5	-	
	Papua + Pabar					
1	Papua	29	1	1	-	1) Kab. Paniai
2	Papua Barat	13	3	3	-	1) Kab. Sorong, 2) Kab Teluk Bintuni, 3) Kab. Fakfak
	Jumlah	42	4	2	-	
	Total	508	118	122	4	

Tabel 20. Kondisi Kapabilitas APIP Pemkab/Pemkot Tw I 2018

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Aceh	23	8	11	4
2	Sumut	33	16	15	2
3	Sumbar	19	-	10	9
4	Riau	12	1	8	3
5	Kepri	7	1	4	2
6	Jambi	11	4	5	2
7	Sumsel	17	6	5	6
8	Bengkulu	10	5	4	1
9	Babel	7	-	5	2
10	Lampung	15	-	9	6
11	Banten	8	-	4	4
12	DKI Jakarta				
13	Jabar	27	2	16	9
14	Jateng	35	-	20	15
15	DIY	5	-	2	3
16	Jatim	38	8	28	2
17	Kalbar	14	-	9	5
18	Kalteng	14	-	13	1
19	Kalsel	13	-	7	6
20	Kaltim	10	3	3	4
21	Kaltara	5	2	3	-
22	Sulut	15	8	5	2
23	Gorontalo	6	-	2	4
24	Sulbar	6	-	4	2
25	Sulteng	13	4	9	-
26	Sulsel	24	11	9	4
27	Sultra	17	10	7	-
28	Bali	9	-	5	4
29	NTB	10	-	6	4
30	NTT	22	-	15	7
31	Maluku	11	3	5	3

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
32	Maluku Utara	10	1	7	2
33	Papua	29	21	7	1
34	Papua Barat	13	2	8	3
	Jumlah	508	116	270	122
	Persentase	100%	22,83%	53,15%	24,02%

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2018 dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP K/L/Pemda antara lain sebagai berikut:

Tabel 21. Pembinaan Kapabilitas APIP K/L/Pemda Tw I 2018

No	Bimtek/ <i>Coaching Clinic</i> / QA Penilaian Kapabilitas APIP	Jml K/L/Pemda
1	Kementerian/ Lembaga	5
2	Pemerintah Provinsi	23
3	Pemerintah Kabupaten	243
4	Pemerintah Kota	55
	JUMLAH	326

B. Permasalahan dan Rencana Tindak

Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pengukuran dan pencapaian kinerja antara lain:

1. Indeks AP3N belum dapat diukur karena pelaksanaan penugasan pengukuran indeks AP3N direncanakan baru mulai pada triwulan IV.
2. Pada triwulan I tahun 2018 penugasan-penugasan yang dilaksanakan oleh Kedeputian masih dalam tahap pembinaan dalam rangka peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, sedangkan penugasan-penugasan QA atas *self assessment* maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mengetahui tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP K/L masih relatif sedikit.

Rencana Tindak

Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain yaitu:

1. Di tingkat K/L akan dilakukan koordinasi dalam rangka inisiasi telaah sejawat antara beberapa kementerian dan lembaga yang sudah siap melakukan telaah sejawat.
2. Meningkatkan komunikasi dalam rangka mewujudkan komitmen SPIP dan APIP melalui bincang pagi dengan K/L/Pemda.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran BPKP tahun 2018 sebesar Rp1.522.532.940.000. Sampai dengan Triwulan I tahun 2018 telah terealisasi anggaran sebesar Rp285.457.659.042,00 atau terserap 18,75%, dengan rincian sebagaimana tabel 1.

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Keuangan BPKP Triwulan I Tahun 2018

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw I 2018 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	1.133.442.236.000	234.680.847.039	20,71
Program 06 (Pengawasan Intern)	389.090.704.000	50.776.812.003	13,05
Jumlah	1.522.532.940.000	285.457.659.042	18,75

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,



Slamet Hariadi
NIP 19590411 198101 1 001

**CAPAIAN KINERJA BPKP
TRIWULAN I TAHUN 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi Tw I 2018	Persen	
			Tahun 2018	Tw. I 2018		Tahun 2018	Tw. I 2018
<i>Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional</i>							
1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	Skala 2	Belum ditargetkan	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
<i>Sasaran Strategis 2. Meningkatnya maturitas SPIP</i>							
2	Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Level 3	%	55%	17%	25.29%	45.98%	148.76
3	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	60%	24%	47.06%	78.43%	196.08
4	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	45%	10%	29.92%	66.49%	299.20
5	Persentase Korporasi dengan Efektivitas SPI Level 3	%	50%	Belum ditargetkan	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
<i>Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda</i>							
6	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas Level 3	%	56%	10%	26.74%	47.75%	267.40
7	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	74%	18%	50.00%	67.57%	277.78
8	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	51%	12%	24.02%	47.10%	200.17

**CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA PENGAWASAN ESELON I DI LINGKUNGAN BPKF
TRIWULAN I TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Thd Target sd Trw. III 2017 (%)					Capaian Thd Target Tahun 2017 (%)				
		D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5
1	Persentase program prioritas dengan indeks AP3N minimal level 2	BU	BU	BU	-	-	BU	BU	BU	-	-
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola program strategis nasional	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
3	Persentase Penghematan Biaya (cost saving)	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
4	Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG minimal baik	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
5	Persentase BUMN dengan kinerja minimal A (baik)	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
6	Persentase BUMD dengan kinerja minimal baik	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
7	Persentase BLUD dengan kinerja minimal baik	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
8	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
9	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
10	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
11	Hasil pengawasan penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
12	Hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
13	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (HKP)	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
14	Persentase K/L/P/K yang menerapkan FCP/FRA	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
15	Persentase auditor yang kompeten di bidang pencegahan	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
16	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
17	Persentase auditor yang kompeten di bidang keinvestigasian	-	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU
18	Persentase K/L dengan maturitas SPIP level 3	103.71	71.23	100.00	100.00	-	46.09	16.54	100.00	49.25	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Thd Target sd Trw. III 2017 (%)					Capaian Thd Target Tahun 2017 (%)				
		D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5
19	Persentase K/L dengan maturitas SPIP level 2	726.19	168.34	100.00	-	-	207.40	168.34	100.00	-	-
20	Persentase Pemprov dengan maturitas SPIP level 3	-	-	196.08	-	-	-	-	78.43	-	-
21	Persentase Pemprov dengan maturitas SPIP level 2	-	-	248.85	-	-	-	-	80.87	-	-
22	Persentase Pemkab/Pemkot dengan maturitas SPIP level 3	-	-	299.20	-	-	-	-	66.49	-	-
23	Persentase Pemkab/Pemkot dengan maturitas SPIP level 2	-	-	108.58	-	-	-	-	65.14	-	-
24	Persentase korporasi dengan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) level 3	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-
25	Persentase APIP K/L dengan kapabilitas level 3	138.26	463.00	-	100.00	-	51.86	49.61	-	49.25	-
26	Persentase APIP K/L dengan kapabilitas level 2	259.2	126.97	100.00	100.00	-	115.25	101.00	100.00	100.00	-
27	Persentase APIP Pemprov dengan kapabilitas level 3	-	-	277.78	-	-	-	-	67.57	-	-
28	Persentase APIP Pemprov dengan kapabilitas level 2	-	-	784.33	-	-	-	-	181.00	-	-
29	Persentase APIP Pemkab/Pemkot dengan kapabilitas level 3	-	-	141.08	-	-	-	-	33.2	-	-
30	Persentase APIP Pemkab/Pemkot dengan kapabilitas level 2	-	-	860.57	-	-	-	-	215.14	-	-
31	Persentase korporasi dengan kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI) level 3	-	-	-	BU	-	-	-	-	BU	-

Keterangan: BU = Belum diukur

**CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA PENGAWASAN ESELON II DI LINGKUNGAN BPKP
TRIWULAN I TAHUN 2018**

No.	Kode	Unit Kerja Pengawasan (Ditwas)	Jumlah IKU	Jml IKU dengan capaian kinerja thd target tahun 2017					
				> 100%	> 90% s.d 100%	> 60% s.d 90%	> 40% s.d 60%	≤ 40%	Belum Diukur
1	D101	Fiskal & Inves	5						5
2	D102	Produksi & SDA	5						5
3	D103	Industri & Distr	5	2				2	1
4	D104	Pinjaman & BLN	-						
5	D105	Perekonomian Lainnya	4		1	2		1	
6	D201	Hankam	5	1		1		3	
7	D202	Lemsetina	4		1	1	1	1	
8	D203	Kesra	5	2	1		2		
9	D204	Polsoskam Lainnya	5	2				3	
10	D301	PKD Wil I	5						5
11	D302	PKD Wil II	7	1		1		5	
12	D303	PKD Wil III	1						1
13	D401	BU Agrobisnis, Konstruksi & Perdag	5	1				4	
14	D402	BU Perhubungan, Pariwisata	8					8	
15	D403	BU Keuangan & Manufaktur	5		1			4	
16	D404	BU Perminyakan & Gas Bumi	6						6
17	D405	BUMD	5					5	
18	D501	Invest Instansi Pemerintah	7			1		6	
19	D502	Investigasi BUMN dan BUMD	5	1		1		3	
20	D503	Investigasi HKP	5			1		4	
21	PW01	Aceh	16			2	1	13	
22	PW02	Sumut	17	2			1	14	
23	PW03	Sumbar	16		2	1	1	12	
24	PW04	Riau	17	1		1	1	14	
25	PW05	Jambi	17	1		1		15	
26	PW06	Bengkulu	16		1			15	
27	PW07	Sumsel	16	1			2	13	
28	PW08	Lampung	14	1	1	2	1	9	
29	PW09	DKI Jakarta	15					15	
30	PW10	Jabar	19		2		1	16	
31	PW11	Jateng	16	2	2	1	2	2	7
32	PW12	DIY	15		3		2	10	
33	PW13	Jatim	17	2	1		2	12	
34	PW14	Kalbar	16			1	1	14	
35	PW15	Kalteng	15	3	1		1	10	

No.	Kode	Unit Kerja Pengawasan (Ditwas)	Jumlah IKU	Jml IKU dengan capaian kinerja thd target tahun 2017					Belum Diukur
				> 100%	> 90% s.d 100%	> 60% s.d 90%	> 40% s.d 60%	≤ 40%	
36	PW16	Kalsel	14		2		2	10	
37	PW17	Kaltim	17		2	1	3	11	
38	PW18	Sulut	16	1	1	2	1	11	
39	PW19	Sulteng	17	1				16	
40	PW20	Sultra	16	1	1	1	2	11	
41	PW21	Sulsel	19	2	1	1	1	14	
42	PW22	Bali	17		2		1	14	
43	PW23	NTB	15	1	2		3	9	
44	PW24	NTT	13		1		1	11	
45	PW25	Maluku	16	1				15	
46	PW26	Papua	16	1				15	
47	PW27	Pabar	15	3	1	1		10	
48	PW28	Kepri	15	2	2			11	
49	PW29	Babel	14	1	1	2	1	9	
50	PW30	Banten	18		1	1	1	15	
51	PW31	Gorontalo	16		2	2		11	1
52	PW32	Sulbar	15					15	
53	PW33	Malut	15		2			13	
54	PW34	Kaltara	14	1	1		2	10	
		JUMLAH	637	38	39	28	37	464	31
		PERSENTASE (%)	100	5.97	6.12	4.40	5.81	72.84	4.87